

ISSN-E: 2623-2065  
ISSN-P: 2684-8872

# SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

**Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)**

Pengaruh Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau

*Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi*

Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat

*Berliana Fatihatuz Fiihza, Yulianti*

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa

*Adeliya Putri Ananda, Hudaidah*

Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur

*Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto*

Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam

*Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah*

Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV

*Indira Rahma Syifa*

Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

*Nukman*

Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang

*Novita Diana Lestari*

Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi

*Tiara Salwadila, Hudaidah*

Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat

*Aprilia Iva Swastika*



# **Dewan Redaksi**

## **SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah**

### **Editor in Chief**

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Section Editor**

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Guest Editor**

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

### **Reviewer/Mitra Bestari**

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

### **Administrasi**

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

### **Alamat:**

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: [jurnalsindang@gmail.com](mailto:jurnalsindang@gmail.com)

**SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH**  
**Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)**

|   | Halaman |
|---|---------|
| Dewan Redaksi .....   | i       |
| Daftar Isi .....  | ii      |
| <br>  |         |
| 1. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning</i> terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau<br><i>Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi</i> ..... | 91      |
| 2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat<br><i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti</i> .....  | 95      |
| 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa<br><i>Adeliya Putri Ananda, Hudaidah</i> .....   | 102     |
| 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur<br><i>Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto</i> .....  | 109     |
| 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam<br><i>Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah</i> .....  | 122     |
| 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV<br><i>Indira Rahma Syifa</i> .....   | 132     |
| 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936<br><i>Nukman</i> .....   | 139     |
| 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang<br><i>Novita Diana Lestari</i> .....   | 152     |
| 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi<br><i>Tiara Salwadi, Hudaidah</i> .....   | 158     |
| 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat<br><i>Aprilia Iva Swastika</i> .....   | 164     |

## KONFLIK INDONESIA BELANDA TERHADAP PEREBUTAN KEKUASAAN IRIAN BARAT

Aprilia Iva Swastika

Universitas Negeri Malang

Alamat korespondensi: apriliaswstk@gmail.com

Diterima: 30 November 2020; Direvisi: 17 Juli 2021; Disetujui: 24 Juli 2021

### Abstract

*The conflict between Indonesia and the Netherlands over the seizure of West Irian occurred in 1949. This problem occurred due to the abundant mining wealth in West Irian that would be exploited by the Dutch on the grounds that they wanted to disarm Japanese troops in Indonesia. By asking the UN for assistance, this problem will be resolved with the KMB agreement. Foreign countries like America also help politically and economically as well as help to finance military equipment and also help increase military troops. During the year the KMB agreement was signed, West Irian was not handed over to Indonesia. Then the Indonesian government at that time fought physically with the formation of TRIKORA, the New York Battle, and PAPER.*

**Keywords:** West Irian conflict, Trikora, New York Agreement, PAPER.

### Abstrak

Konflik antara Indonesia dengan Belanda mengenai perebutan Irian Barat terjadi pada tahun 1949. Permasalahan ini terjadi akibat kekayaan tambang di Irian Barat yang melimpah akan dimanfaatkan oleh Belanda dengan alasan melucuti tentara-tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Dengan meminta bantuan kepada PBB, permasalahan ini akan diselesaikan dengan adanya kesepakatan KMB. Negara asing seperti Amerika juga membantu dalam segi politik dan ekonomi seperti halnya membantu untuk membiayai peralatan militer dan juga membantu penambahan pasukan militer. Selama setahun kesepakatan KMB ditandatangani, Irian Barat tidak di serahkan kepada Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia pada waktu itu melakukan perlawanan secara fisik dengan terbentuknya TRIKORA, Perjanjian New York, dan PAPER.

**Kata Kunci:** Konflik Irian Barat, TRIKORA, perjanjian New York, PAPER.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa kepulauan yang mencakup pulau kecil dan pulau besar. Secara historis, Indonesia merupakan wilayah bekas dari jajahan Hindia Belanda. Kepulauan Hindia Belanda merupakan wilayah yang dipisahkan oleh laut bebas. Adanya bukti bahwa Hindia Belanda merupakan kepulauan yang terpisah dan bukan kesatuan adalah digunakannya ketentuan laut teritorial Hindia Belanda 3 mill (5,55 km) menurut (Winarno. 2007) dalam (Istiadi, tanpa tahun). Ketentuan yang digunakan Belanda berbeda dengan Indonesia, bahwa kepulauan Indonesia

diatur oleh ketentuan kekuasaan Kerajaan Majapahit pada saat itu.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alaminya terutama pada hasil tambang emas dan tembaga. Perusahaan tambang yang ada di Irian Barat dikenal dengan nama PT freeport yang berada di Mimika, Irian Barat. Hal ini menguntungkan pihak Indonesia karena PT freeport memberikan pajak kepada pemerintah Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Irian Barat menjadi pembantu perekonomian Indonesia untuk sumber pendapatan negara (Elisabeth. 2016). Berbanding terbalik dengan kekayaan yang dihasilkan, sebagian masyarakat yang tinggal di Irian Barat mengalami

masalah keterbelakangan di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik. Permasalahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai kembali Irian Barat dan Belanda ingin menjadikan Irian Barat berdir sendiri sebagai negara yang utuh dan lepas dari Indonesia. Dari permasalahan tersebut timbullah konflik untuk memperebutkan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kedua belah pihak negara yang bersangkutan melakukan perjanjian yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda bernama Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada saat terjadinya KMB, Belanda memiliki pendapat bahwa Irian Barat tidak termasuk ke dalam wilayah NKRI karena ada beberapa faktor. Akan tetapi mendengar pendapat tersebut, Indonesia membantah dan menyatakan bahwa Irian Barat merupakan bagian Indonesia yang juga harus merdeka. Dari perdebatan yang terjadi, kedua negara bersepakat bahwa konflik perebutan Irian Barat akan diselesaikan selama setahun setelah konferensi tersebut ditandatangani.

Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang sejarah terjadinya perebutan wilayah Irian Barat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik perebutan Irian Barat, serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dengan Amerika untuk mempertahankan Irian Barat menjadi bagian dari NKRI, dan juga untuk mengetahui proses kembalinya Irian Barat kepada NKRI. Untuk melakukan tujuan tersebut perlu adanya kajian tentang 1) bagaimana latar belakang terjadinya konflik perebutan Irian Barat, 2) apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Amerika

untuk mempertahankan Irian Barat, 3) bagaimana proses kembalinya Irian Barat kepada NKRI.

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah menggunakan metode kajian pustaka. Menurut (Setyosari. 2007) metode kajian pustaka adalah metode penelitian yang menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal. Sedangkan menurut (Nazir. 1998) studi pustaka adalah cara/teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melelah catatan, buku, literatur, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Sumber referensi yang dijadikan acuan dalam artikel ini adalah jurnal ilmiah mengenai perebutan Irian Barat.

## **C. Pembahasan**

### **Latar Belakang Terjadinya Perebutan Irian Barat**

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kedudukannya telah di akui oleh negara-negara lain. Akan tetapi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Setelah dinyatakan merdeka Indonesia melakukan revolusi untuk membentuk pemerintahan negara yaitu dengan membentuk pemerintahan, penentuan UUD 1945 serta dasar negara yaitu Pancasila, maupun membentuk beberapa provinsi untuk wilayah Indonesia, dll. Pada proses pembentukan berlangsung dikenal dengan rapat Pembentukan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Akan tetapi saat pembentukan provinsi, Pemerintah Indonesia bimbang untuk menentukan wilayah. Kebimbangan tersebut terjadi karena harus mengikuti kekuasaan Kerajaan Majapahit atau mengikuti kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, karena kekuasaan

Indonesia merupakan wilayah dari jajahan Hindia Belanda

Masa revolusi menimbulkan masalah yang baru bagi Indonesia, karena pada masa ini banyak sekali gerakan pendaulatan dan disertai dengan pembunuhan dan kekerasan. Melihat kejadian tersebut, Belanda beserta para sekutu kembali ke Indonesia dengan alasan akan melucuti tentara-tentara Jepang yang berada di Indonesia. Selain itu juga terdapat keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia yang merupakan tanah bekas jajahan negara Belanda. Banyaknya cara Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, menjadikan Indonesia melakukan perlawanan terhadap Belanda (Istiadi, tanpa tahun). Belanda ingin memberi status tersendiri kepada Irian Barat bahwa Irian Barat akan menjadi suatu negara yang berdiri sendiri atau terbebas dari daerah bekas jajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1949 muncul konflik perebutan wilayah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Pada masa itu, Indonesia meminta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) supaya mencari jalan keluar dari permasalahan sengketa antara Indonesia dengan Belanda tersebut.

#### **Upaya Kerjasama Indonesia dengan Amerika Untuk Mempertahankan Irian Barat**

Untuk mengatasi permasalahan ini Indonesia tidak ingin melakukan kekerasan terhadap Belanda, akan tetapi permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai. Kemudian Indonesia mengadakan perundingan damai dengan Belanda. Perundingan tersebut di langgar oleh Belanda, bahkan Belanda sudah menyiapkan agresi militer I dan agresi militer II untuk menyerang Indonesia. Perilaku Belanda tersebut menimbulkan perhatian dari negara-negara lain, tak terkecuali

Australia, Amerika, dll (Istiadi, tanpa tahun). Konflik antara Indonesia dengan Belanda mendapat sorotan dari dewan PBB, negara Amerika serta negara Eropa lainnya. Hubungan antara Amerika dan Indonesia terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia sehingga terjadilah bantuan dari Amerika untuk mempertahankan Irian Barat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1949 kedua pihak negara sepakat untuk melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang di selenggarakan di Den Haag, Belanda. Pada saat terjadinya KMB, Belanda memiliki pendapat bahwa Irian Barat tidak termasuk ke dalam wilayah NKRI. Pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan kultural dan administrasi. Sedangkan pihak Indonesia membantah dan menyatakan bahwa Irian Barat sebagai saudara bangsa yang juga harus merdeka. Dari perdebatan tersebut, kedua negara bersepakat bahwa perebutan wilayah Irian Barat ini akan diselesaikan selama setahun setelah konferensi tersebut ditandatangani (Anwar, 2018).

Melihat permasalahan yang ada di Indonesia, Amerika terlibat dalam membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Dikarenakan masalah Irian Barat menjadi tugas dari PBB sejak tahun 1949. Peran Amerika tidak hanya sebatas menjadi penengah dari permasalahan perebutan wilayah Irian Barat, tetapi Amerika juga memperhatikan perekonomian di Irian. Adanya bantuan dari Amerika tersebut karena Amerika ingin menjadikan Irian Barat menjadi negara yang merdeka, sama halnya dengan Belanda. Alasannya karena dapat mengelola wilayah Irian Barat dengan bebas tanpa ada perjanjian dengan Indonesia (Wihardyantje, 2018). Banyak bantuan yang diberikan dari Amerika seperti membantu Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dengan memberikan biaya untuk membeli peralatan militer dan bantuan militer Amerika.

Demokrasi parlementer berdiri pada tahun 1950 dan penerapannya sesuai dengan demokrasi yang diamanatkan

oleh UUDS 1950. Presiden Soekarno menunjuk Ketua Masyumi M. Natsir sebagai formatur kabinet. Saat M. Natsir memerintah, timbullah masalah Irian Barat yang harus dihadapi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Natsir menghadiri Perundingan yang terjadi di Den Haag terjadi pada tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember 1950. Perundingan tersebut gagal dan tidak ada kesepakatan dari hasil perundingan tersebut. Dari kegagalan tersebut Presiden Soekarno memberikan usulan agar membatalkan persetujuan perjanjian KMB, serta memberikan sanksi ekonomi kepada Belanda. Tekat Presiden Soekarno sangat kuat untuk menarik kembali Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Akan tetapi usulan Presiden Soekarno ditolak oleh perdana menteri M. Natsir karena Natsir menginginkan penyelesaian masalah lewat jalur diplomasi. Kejadian tersebut menimbulkan perselisihan antara Presiden Soekarno dan M. Natsir. Untuk menghargai pendapat Presiden Soekarno, M. Natsir melakukan voting terhadap pengambilan keputusan dari perbedaan pendapat tersebut. Dari 17 orang yang melakukan voting, Presiden Soekarno hanya mendapatkan 5 suara, sedangkan 12 suara berpihak pada M. Natsir untuk melakukan jalur diplomasi. Presiden Soekarno sangat kecewa terhadap hasil voting yang tetap menjalankan jalur diplomasi untuk mengatasi masalah Irian Barat (Siregar. 2011).

Hasil keputusan dari KMB terdiri dari lima yaitu, pertama adanya pengakuan dari Belanda bahwa Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Kedua, setelah pengakuan kedaulatan, keresidenan Irian Barat diselenggarakan dalam waktu satu tahun. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama suka rela dan sederajat. Keempat Indonesia akan mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak korensi dan izin baru terhadap perusahaan Belanda. Kelima, sejak tahun 1942 Indonesia harus melunasi utang kepada Belanda.

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017).

Setelah setahun lamanya konferensi ditanda tangani, permasalahan Irian Barat tidak lagi di dibahas. Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1960 Belanda masih berkuasa terhadap Irian Barat, hal ini menjadi periode yang penuh konflik bagi Indonesia. Sehingga terjadi perpecahan pada masyarakat akibat dari sistem Demokrasi Liberal yang mengakibatkan masalah tersebut tidak dibahas (Anwar. 2018). Banyaknya cara untuk melepas genggaman Belanda terhadap Irian Barat tidak juga membuahkan hasil. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden untuk mengatasi permasalahan tersebut. Isi dari Dekrit Presiden adalah membubarkan konstituante, pemberlakuan UUD 1945, serta membantuk MPRS dan DPAS. Dengan terbentuknya dekrit presiden menandakan berakhirnya demokrasi liberal yang kemudian digantikan dengan demokrasi terimpin.

### **Proses Kembalinya Irian Barat Ke NKRI**

Pada tahun 1961 Belanda masih menguasai Irian Barat, yang artinya usaha pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dengan demokrasi terpimpin belum berhasil. Untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perlawanan secara fisik. Presiden Soekarno menyatakan pidato TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yang terjadi pada 19 Desember 1961. Isi dari pidato TRIKORA adalah perintah untuk menggagalkan pembentukan Negara Papua buatan Belanda, perintah untuk mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan perintah untuk mempersiapkan mobilisasi umum serta mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia (Istiadi. Tanpa tahun). Pelaksanaan TRIKORA menghasilkan pembentukan Komando Mandala yang bertujuan untuk membebaskan Irian Barat, dan dipimpin oleh Jendral Soeharto yang memiliki

kantor pusat yang terletak di Makasar Sulawesi. Rencana Jendral Soeharto adalah menyusup ke wilayah Papua Barat untuk menghancurkan dan mengusir paksa musuh. Selain itu rencana lainnya adalah penyusunan gabungan tentara AD, AU, dan AL sebagai upaya pembangunan pangkalan perang, integrasi pasukan, mempelajari keadaan perang, dan mempelajari kekuatan Belanda (Suryana. 2017).

Kejadian ini, mengundang Amerika untuk mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah Irian Barat. Kemudian Indonesia menyetujui usulan Bunker sedangkan Belanda menolak. Pihak Amerika memaksa Belanda untuk menerima dan menandatangani persetujuan Perjanjian New York. Persetujuan tersebut terjadi pada 15 Agustus 1962 (Sudrajat. 2015). Isi dari perjanjian New York adalah akan berdiri UNETA di Irian Barat pada 1 Oktober 1962 setelah dilaksanakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Kedua, pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat tetapi berada pada kekuasaan UNETA. Ketiga, angkatan militer Belanda akan dipulangkan secara bertahap. Keempat, adanya lalu lintas bebas atau keluar masuk besbas antara Irian Barat dengan Indonesia. Kelima, mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera sang merah putih dikibarkan bersandingan dengan bendera PBB. Keenam, pada tanggal 1 Mei 1963 UNETA menyerahkan Irian Barat kepada NKRI (Istiadi. Tanpa tahun).

Masuknya Irian Barat ke wilayah Indonesia merupakan hasil dari keputusan perjanjian New York dan diawasi oleh PBB. Pada tanggal 15 Agustus 1969 setelah perjanjian New York, terselenggarakan PAPERERA (Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat). Hasil dari PAPERERA adalah Irian Barat merupakan bagian dari NKRI yang kemudian pada tanggal 19 November 1969 disetujui oleh PBB (Sudrajat. 2015). PAPERERA ditujukan kepada masyarakat Irian Barat bahwa adanya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi ada beberapa kendala dalam pelaksanaan

PAPERERA yaitu letak pemukiman masyarakat Papua yang masih tergolong pendalaman dan yang masih banyak masyarakat yang belum mengenal tulisan pada saat itu. Sehingga ada kekawatiwan yang akan menghalangi pelaksanaan PAPERERA (Istiadi. Tanpa tahun). Tokoh Indonesia yang memperjuangkan PAPERERA adalah Amir Machmud, beliau tidak pernah mempertanyakan status Irian Barat karena menurut Amir Machmud jelas wilayah tersebut telah menjadi bagian dari Republik Indonesia dan akan tetap seperti itu. Beliau sangat yakin karena sudah menyusun dengan matang program-program PAPERERA serta memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi (Suryana. 2017). Pelaksanaan PAPERERA yang diawasi oleh PBB merupakan tahap terakhir untuk menyelesaikan permasalahan perebutan Irian Barat. Hasil akhir dari PAPERERA adalah masuknya Irian Barat kedalam kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **D.Kesimpulan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah dinyatakan merdeka Indonesia melakukan revolusi yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan negara dan pembentukan provinsi. Masa revolusi menimbulkan masalah baru, dengan keadaan seperti ini Belanda memiliki niat jahat dan ingin menjajah kembali Indonesia terutama di Irian Barat. Tahun 1949 muncullah konflik antara Indonesia dengan Belanda tentang perebutan Irian Barat. Indonesia meminta bantuan kepada PBB untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak Amerika juga ikut membantu Indonesia dalam konflik ini, seperti bantuan berupa pemberian biaya untuk peralatan militer dan bantuan militer.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 1949. Hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia selama

setahun setelah penandatanganan konferensi. Setelah setahun lamanya, permasalahan Irian Barat tidak dibahas oleh Belanda, kemudian Indonesia melakukan perlawanan fisik. Pada tanggal 19 Desember 1961 terbentuklah TRIKORA (Tri Komando Rakyat) yang menghasilkan Operasi Mandala yang dipimpin oleh Jendra Soeharto untuk mengusir musuh. Pada tanggal 19 Agustus 1962 terbentuklah Perjanjian New York yang dibuat oleh Amerika. Perjanjian New York diawasi oleh PBB dan menghasilkan masuknya Irian Barat ke Indonesia. Dari perjanjian New York, pada tanggal 15 Agustus 1969 terselenggarakan PAPERERA (Penentuan Pendapat Rakyat). PAPERERA ditujukan kepada masyarakat Irian Barat bahwa adanya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

### Daftar Referensi

- Anwar S. (2018). Dukungan Kelompok Masyarakat Terhadap Trikora dan Pelaksanaan Mobilisasi Umum Di Jawa Tengah 1961-1962. *Lib. Unnes.acid*.
- Elisabth A. (2016). Perdamaian Dan Pembangunan Papua: Problematika Politik Atau Ekonomi. *Jurna penelitian Politik*.
- Istiadi R, dkk. Tanpa tahun. Kembalinya Irian Barat Ke NKRI Tahun 1969. *Media.neliti.com*.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Pasang Surut Wilayah Indonesia. *Perpusnas Jalan Jendral Sudirman Kav. 4-5 Senayan Jakarta*.
- Nasir M. (1988). Metode Penelitian Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Setyosati T, Widijoto H. (2017) Metode Penelitian Pendidikan. *Malang: Rosindo*,
- Siregar I. F. (2011). Dinamika Demokrasi Di Indonesia Masa Orde Lama: Strudi Kasis Antara Sukarno Versus Masyumi. *Paramita Vol. 21 No. 1 Januari 2011 Hal. 25-36*.
- Sudrajat H. I. (2015). Operasi Mandala Dalam Rangka Pembebasan Irian Barat: Pasang Surut Hubungan

Indonesa-Belanda 1961-1962. *Repository.upi.edu*.

- Suryana A. Y, dkk. (2017). Peran Amir Machmud Dalam Pelaksanaan Papera 1969. *Factum Vol. 6 No. 2 Oktober 2017*.
- Wihardyantie F. S, dkk. (2018). Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Irian Barat 1960-1963. *Historia: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah Vol. II No. I Oktober 2018*.